

PENGARUH *ECONOMIC FREEDOM* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Haryani ¹⁾ dan Zakia Muna ²⁾

¹⁾Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim

²⁾Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh kebebasan dari korupsi, kebebasan investasi, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan pengeluaran pemerintah dan kebebasan hak kepemilikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka data yang digunakan dari data 8 tahun (2011-2018) yang diinterpolasi menjadi 32 data penelitian. Data tersebut diperoleh dari BPS Indonesia dan Heritage Foundations. Teknik analisis dan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kebebasan dari korupsi, kebebasan investasi, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan pengeluaran pemerintah dan kebebasan hak kepemilikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara parsial variabel kebebasan dari korupsi, kebebasan investasi dan kebebasan moneter berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan variabel kebebasan perdagangan, kebebasan pengeluaran pemerintah dan kebebasan hak kepemilikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Keywords: *Kebebasan Korupsi, Kebebasan Investasi, Kebebasan Moneter, Kebebasan Perdagangan, Kebebasan Pengeluaran Pemerintah, Kebebasan Hak Kepemilikan dan Pertumbuhan Ekonomi*

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi menggambarkan ukuran kemampuan Negara dalam meningkatkan hasil produksi barang dan jasa dalam rangka mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari laju pertumbuhan penduduknya. Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sejauhmana barang dan jasa yang diproduksi masyarakat dapat meningkat dan mereka memperoleh kesejahteraan dari memproduksi barang dan jasa tersebut.

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pendapatan nasional, namun juga memperhitungkan masalah lain seperti perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, institusi nasional, ketimpangan pendapatan, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan harapan bagi setiap negara. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2011-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Keterangan	PDB
2011	6,17
2012	6,03
2013	5,56
2014	5,01
2015	4,88
2016	5,03
2017	5,07
2018	5,17

Sumber: BPS Indonesia (2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2011-2018 mengalami fluktuasi dimana pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,88% dan tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 6,17%.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara. Setiap negara akan senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya, seperti dengan meningkatkan proses produksi, investasi baik di dalam maupun di luar negeri, perdagangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan nasional negara tersebut.

Suparyati (2014:226) mengemukakan bahwa faktor yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kebebasan ekonomi (*economic freedom*) yang terdiri dari kebebasan hak milik, kebebasan dari korupsi, kebebasan fiskal, kebebasan pengeluaran pemerintah, kebebasan dalam berbisnis, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan berinvestasi dan kebebasan financial. Setiap faktor penyusunan kebebasan ekonomi memiliki nilai atau skor pada skala 0 hingga 100. Semakin tinggi skor menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kebebasan ekonomi di suatu Negara.

Kebebasan ekonomi suatu Negara bisa dianggap penting sebagai indikator kemajuan tingkat kesejahteraan sebuah negara. Kebebasan ekonomi harus mampu memberi ruang bagi negara untuk memberdayakan masyarakat agar dapat bekerja, memproduksi, berdagang, dan berinvestasi sesuai dengan pilihan pribadi. Keterbukaan dan kebebasan ekonomi memang menjadi isu yang banyak diperbincangkan dewasa ini.

Adapun Indeks Kebebasan Ekonomi di Indonesia dari tahun 2011-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Indeks Kebebasan Ekonomi di Indonesia (dalam persen)

Tahun	KK	KI	KM	KP	KPP	HK
2011	28.0	35.0	74.3	73.8	88.9	30.0
2012	30.0	35.0	75.5	75.0	89.2	30.0
2013	30.0	35.0	75.5	75.0	89.2	30.0
2014	28.0	40.0	76.4	74.8	89.8	30.0
2015	32.0	40.0	34.9	74.8	88.3	30.0
2016	34.0	40.0	74.3	80.4	89.0	30.0
2017	36.0	35.0	74.0	80.6	44.7	48.3
2018	38.0	35.0	74.0	80.8	76.1	48.4

Sumber: Heritage Foundations (2019)

Note:

- KK : Kebebasan Korupsi
- KI : Kebebasan Investasi
- KM : Kebebasan Moneter
- KP : Kebebasan Perdagangan
- KPP : Kebebasan Pengeluaran Pemerintah
- KHK : Kebebasan Hak Kepemilikan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indeks kebebasan ekonomi di Indonesia berfluktuasi. Kebebasan ekonomi di Indonesia menempati ranking 100 dunia dari 178 negara dan masih termasuk dalam kategori "*mostly unfree*" (Heritage Foundation, 2019). Permasalahan di Indonesia terutama terjadi karena penegakan hukum yang belum baik, korupsi yang masih tinggi, masih adanya pengaruh politik dalam sistem peradilan dan hak kepemilikan yang tidak dilindungi dengan baik. Korupsi masih menjadi epidemic yang parah di Indonesia, begitu juga penyusutan dan pencucian uang. Membuka bisnis di Indonesia juga masih cukup sulit, membutuhkan waktu yang lama untuk mengurus izin usaha. Meskipun sudah banyak membuka peluang investasi asing, begitu juga dari sisi perdagangan, masih banyak hambatan yang diterapkan oleh Pemerintah.

Tingkat kebebasan ekonomi yang masih buruk, menjadi salah satu pemicu faktor melemahnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan tidak mencapai target pemerintah. Karena itulah, kebebasan ekonomi sebagai kebebasan warga untuk memproduksi, mengkonsumsi dan melakukan investasi harus diperbaiki.

Di era globalisasi dan demokrasi saat ini, adanya indeks kebebasan ekonomi menjadi peran penting untuk mencapai adanya kebebasan yang diinginkan di setiap Negara. Penelitian mengenai *economic freedom* masih jarang dan sedikit sehingga masih banyak yang belum memahami mengenai *economic freedom*. Padahal beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti menurut Suparyati dan Fadilah (2015:174) *Economic*

Freedom berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun Negara berkembang. Wulandari (2014:117) secara overall *Economic Freedom* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berlandaskan uraian diatas maka kebenaran akan hipotesis *economic freedom* yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sehingga melalui indeks kebebasan ekonomi ini dapat mendukung Indonesia dalam persaingan internasional dengan melepaskan hambatan-hambatan yang ada untuk berada di posisi terdepan dalam kemajuan dan globalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh kebebasan dari korupsi, kebebasan investasi, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan pengeluaran pemerintah dan kebebasan hak kepemilikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Kajian Teoritis

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Menurut Sukirno (2014:9) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Arsyad (2014:12) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB atau PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau memungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyusaian-penyusaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Masing-masing ketiga komponen pokok dari definisi ini sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu. Yaitu, 1) kenaikan output secara berkesinambungan adalah menifestasi atau perwujudan dari pada

yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan penyediaan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (*economic maturity*) disuatu Negara yang bersangkutan, 2) perkembangan teknologi merupakan dasar prakondisi bagi berlansungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, ini adalah suatu kondisi yang diperlukan, tetap tidak cukup itu saja (jadi disamping kemajuan teknologi masih diperlukan faktor-faktor lain, 3) guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkadang didalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian kelembagaan, sikap, dan ideologi (Todaro 2015:130).

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Suparyati (2014:226) mengemukakan bahwa faktor yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kebebasan ekonomi (*economic freedom*) yang terdiri dari kebebasan hak milik, kebebasan dari korupsi, kebebasan fiskal, kebebasan pengeluaran pemerintah, kebebasan dalam berbisnis, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan berinvestasi dan kebebasan financial.

Wulandari (2014:120) juga mengutarakan hal yang sama, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh komponen penyusun kebebasan ekonomi (*economic freedom*) yang terdiri dari kebebasan hak milik, kebebasan dari korupsi, kebebasan fiskal, kebebasan pengeluaran pemerintah, kebebasan dalam berbisnis, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan berinvestasi dan kebebasan financial.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh kebebasan ekonomi (*economic freedom*). Kebebasan ekonomi adalah bagian dari kebebasan yang memperhatikan masalah otonomi material dari individu dalam hubungannya dengan negara dan group terorganisir lainnya. Individu yang bebas secara ekonomi adalah individu yang memiliki kontrol penuh terhadap tenaga kerja dan propertinya.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat *time series* yaitu data *economic freedom* (kebebasan dari korupsi, kebebasan investasi, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan pengeluaran pemerintah dan kebebasan hak

kepemilikan) dan pertumbuhan ekonomi selama 8 tahun (2011-2018) yang diperoleh dari BPS Indonesia dan Heritage Foundations. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Dimana :

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- X₁ = Kebebasan Dari Korupsi
- X₂ = Kebebasan Investasi
- X₃ = Kebebasan Moneter
- X₄ = Kebebasan Perdagangan
- X₅ = Kebebasan Pengeluaran Pemerintah
- X₆ = Kebebasan Hak Kepemilikan
- a = Bilangan konstanta
- b₁₋₆ = Koefisien regresi
- e = *error term*

4. Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagramlingkaran, pictogram, perhitungan nilai *minimum*, nilai *maximum*, *mean* dan *standarddeviation*. Pengujiannya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Keterangan	PE	KK	KI	KM	KP	KPP	KHK
Mean	25.36	32.00	36.87	69.86	76.90	81.90	34.58
Std. Dev	.49	3.70	2.587	14.15	3.08	15.70	8.494
Minimum	4.88	28.00	35.00	34.90	73.80	44.70	30.00
Maximum	6.17	38.00	40.00	76.40	80.80	89.80	48.40

Sumber: Data Sekunder, 2019 (diolah)

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimum pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2011-2018 sebesar 4,88% dan nilai maksimum sebesar 6,17%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 4,88% sampai dengan 6,17% dengan nilai rata rata 25.3650 pada standar deviasi 0.49667. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $25.3650 > 0.49667$, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2011-2018 tergolong baik.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia turun pada tahun 2013-2015. Penurunan ini disebabkan oleh lambatnya perbaikan konsumsi

rumah tangga dibandingkan perbaikan PDB per kapita disebabkan perbaikan PDB perkapita yang lebih didorong oleh perbaikan kinerja ekspor komoditas sumber daya alam. Meningkatnya kinerja ekspor SDA tersebut seiring dengan tingginya permintaan terhadap komoditas SDA khususnya dari Tiongkok. Kondisi tersebut berdampak pada relatif lebih tingginya pertumbuhan investasi di sektor SDA dibandingkan investasi di sektor manufaktur yang menjadi tumpuan penciptaan lapangan kerja.

Sedangkan peningkatan mulai terjadi pada tahun 2016-2018, pemulihan perekonomian Indonesia pada 3 tahun tersebut berlanjut gradual didorong perbaikan ekspor dan investasi. Dinamika pertumbuhan ekonomi menunjukkan perekonomian nasional telah melewati titik terendah pertumbuhan ekonomi yakni 4,88% yang terjadi pada tahun 2015. Perkembangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi terus membaik secara perlahan sehingga PDB pada 2018 tercatat tumbuh 5,17% meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Dinamika tersebut ditopang pergerakan ekspor dan investasinya pada 2017 membaik sejalan kondisi global yang kondusif dan stabilitas ekonomi domestik yang terjaga baik. Peran ekspor dan investasi yang menguat juga tergambar pada kontribusi kedua komponen tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi yang meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016. Namun pertumbuhan ekonomi mulai pada tahun 2015-2018 masih dibawah target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perkembangan Kebebasan Korupsi

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimum kebebasan korupsi di Indonesia tahun 2011-2018 sebesar 28,00% dan nilai maksimum sebesar 38,00%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya kebebasan korupsi di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 28,00% sampai dengan 38,00% dengan nilai rata rata 32.0000 pada standar deviasi 3.70328. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $32.0000 > 3.70328$, berarti bahwa kebebasan korupsi di Indonesia tahun 2011-2018 tergolong rendah. Kasus korupsi yang masih merajalela tentu berimbas buruk pada reputasi Indonesia di mata internasional. Buruknya birokrasi yang berujung pada tingginya kasus korupsi di Indonesia menyebabkan indeks kebebasan ekonomi masih pada level yang rendah.

Perkembangan Kebebasan Investasi

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimum kebebasan investasidi Indonesia sebesar 35,00% dan nilai maksimum sebesar 40,00%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya kebebasan investasi di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 35,00% sampai dengan 40,00% dengan nilai rata rata 36.8750 pada standar deviasi 2.58775. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $36.8750 > 2.58775$, berarti bahwa kebebasan investasi di Indonesia tergolong baik. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di wilayah Asia yang menjadi tujuan favorit para investor.

Perkembangan Kebebasan Moneter

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimum kebebasan moneter di Indonesia sebesar 34,90% dan nilai maksimum sebesar 76,40%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya kebebasan moneter di Indonesiatahun 2011-2018 yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 34,90% sampai 76,40% dengan nilai rata rata 69.8625 pada standar deviasi 14.15374. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $69.8625 > 14.15374$, berarti bahwa kebebasan moneter di Indonesia tahun 2011-2018 tergolong baik.

Perkembangan Kebebasan Perdagangan

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai minimum kebebasan perdagangan di Indonesia sebesar 73,80% dan nilai maksimum sebesar 80,80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya kebebasan perdagangan di Indonesia tahun 2011-2018 yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 73,80% sampai 80,80% dengan nilai rata rata 76.9000 pada standar deviasi 3.08915. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $76.9000 > 3.08915$, berarti bahwa kebebasan perdagangan di Indonesia tahun 2011-2018 tergolong baik. Kebebasan perdagangan adalah ukuran dari tidak adanya hambatan tarif dan non tarif (NTB) yang dapat mempengaruhi ekspor-impor barang dan jasa yang dihitung dari tingkat tarif rata-rata tertimbang dan hambatan non tarif.

Era perdagangan bebas memaksa Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk-produknya di pasar internasional. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan cara menjalin perjanjian kerjasama dengan negara lain. Berbagai perjanjian kerjasama tersebut memberikan kontribusi terhadap perdagangan internasional. Namun demikian, meskipun indeks keterbukaan perdagangan menunjukkan perkembangan yang positif, para eksportir dan importir Indonesia masih menghadapi berbagai

kendala dalam menjalankan aktivitas usahanya. Kendala-kendala tersebut seperti buruknya infrastruktur, banyaknya pungutan liar, dan inefisiensi di pelabuhan. Jika pemerintah mampu menghilangkan kendala-kendala tersebut, aktivitas perdagangan nasional hampir dapat dipastikan akan membaik.

Perkembangan Kebebasan Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimum kebebasan pengeluaran pemerintah di Indonesia sebesar 44,70% dan nilai maksimum sebesar 89,80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya kebebasan pengeluaran pemerintah di Indonesia tahun 2011-2018 yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 44,70% sampai 89,80% dengan nilai rata rata 81.9000 pada standar deviasi 15.70641. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $81.9000 > 15.70641$, berarti bahwa kebebasan pengeluaran pemerintah di Indonesia tahun 2011-2018 tergolong baik. Pengeluaran pemerintah adalah ukuran terhadap pengeluaran pemerintah baik dilihat dari konsumsi dan transfer pemerintah. Skala untuk memberikan skor terhadap ukuran pemerintah bersifat nonlinier yang artinya bahwa pengeluaran pemerintah yang mendekati 0 dipenalti, sedangkan pengeluaran pemerintah yang melebihi 30% dari GDP menerima skor yang lebih buruk dengan rumus kuadrat (dua kalilipat pengurangan akan mengurangi kebebasan empat kali lipat), jadi hanya pemerintah yang besar yang akan menerima skor yang sangat rendah. Ketertarikan pemerintah terhadap sumber daya swasta mempengaruhi kebebasan dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan bila perekonomian yang diatur oleh Negara memperoleh pertumbuhan tinggi melalui pengeluaran yang besar, halt ersebut akan mengurangi kebebasan dalam prosesnya dan dapat merusak potensi pertumbuhan jangka panjang suatu negara.

Perkembangan Kebebasan Hak Kepemilikan

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimum kebebasan hak kepemilikan di Indonesia sebesar 30,00% dan nilai maksimum sebesar 48,40%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya kebebasan hak kepemilikan di Indonesia tahun 2011-2018 yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 30,00% sampai 48,40% dengan nilai rata rata 34.5875 pada standar deviasi 8.49444. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $34.5875 > 8.49444$, berarti bahwa kebebasan hak

kepemilikan di Indonesia tahun 2011-2018 tergolong baik. Kebebasan hak kepemilikan merupakan penilaian terhadap penegakan hukum pemerintah kepada individu dalam mengakumulasi milik pribadinya secara bebas. Hak kepemilikan yang baik, memberi masyarakat keyakinan untuk melakukan aktivitas komersial, menabung dan membuat rencana jangka panjang karena mereka tahu bahwa pendapatan dan tabungan mereka aman.

Analisis Regresi

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variable bebas kebebasan korupsi (X1), kebebasan investasi (X2), kebebasan moneter (X3), kebebasan perdagangan (X4), kebebasan pengeluaran pemerintah (X5) dan kebebasan hak kepemilikan (X6) terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi (Y) di Indonesia, baik secara simultan maupun secara parsial.

Tabel 2. Analisis Of Variance (ANOVA)

Variabel	B	SE	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
a	-2,969	1,706	-1,740	2,036	0,094
KK	-0,615	0,169	-3,634	2,036	0,001
KI	-0,370	0,056	-6,611	2,036	0,000
KM	-0,058	0,017	-3,416	2,036	0,002
KP	0,645	0,179	3,613	2,036	0,001
KPP	0,038	0,010	3,805	2,036	0,001
KHK	0,053	0,026	2,055	2,036	0,050
R = 0,999 R ² = 0,998 F _{hitung} = 184,507 F _{tabel} = 2,31 Sig. F = 0.004					

Sumber: Data Sekunder, 2019 (diolah).

Berdasarkan hasil uji statistik regresi berganda yang diperoleh dengan pengolahan data menggunakan software SPSS 18.0 seperti terlihat pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -2,969 - 0,615X_1 - 0,370X_2 - 0,058X_3 + 0,645X_4 + 0,038X_5 + 0,053X_6 + e$$

Nilai konstanta (a) yaitu -2,969 ini berarti bahwa apabila variabel bebas (kebebasan korupsi, kebebasan investasi, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan pengeluaran pemerintah dan kebebasan hak kepemilikan) sama dengan nol (0), maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebesar -2,969%.

Koefisien regresi kebebasan korupsi (X1) sebesar -0,615 artinya setiap terjadi peningkatan pada variabel kebebasan korupsi (X1) sebesar 1 persen, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Y) di Indonesia sebesar

0,615%, dengan asumsi seluruh variabel-variabel bebas lainnya konstan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negative atau searah antara variabel kebebasan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Koefisien regresi kebebasan investasi (X2) sebesar -0,370 artinya setiap terjadi peningkatan pada variabel kebebasan investasi sebesar 1 persen, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Y) di Indonesia sebesar 0,370. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negative atau searah antara variabel kebebasan investasi dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Koefisien regresi kebebasan moneter (X3) sebesar -0,058 artinya setiap terjadi peningkatan pada variabel kebebasan moneter sebesar 1 persen, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Y) di Indonesia sebesar 0,058. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negative atau searah antara variabel kebebasan moneter dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Koefisien regresi kebebasan perdagangan (X4) sebesar 0,645 artinya setiap terjadi peningkatan pada variabel kebebasan perdagangan sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y) di Indonesia sebesar 0,645%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif atau searah antara variabel kebebasan perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Koefisien regresi kebebasan pengeluaran pemerintah (X5) sebesar 0,038 artinya setiap terjadi peningkatan pada variabel kebebasan pengeluaran pemerintah sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y) di Indonesia sebesar 0,038%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif atau searah antara variabel kebebasan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Koefisien regresi kebebasan hak kepemilikan (X6) sebesar 0,053 artinya setiap terjadi peningkatan pada variabel kebebasan hak kepemilikan sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y) di Indonesia sebesar 0,053%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif atau searah antara variabel kebebasan hak kepemilikan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan software SPSS 18.0, maka diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,965 atau 96,5%. Menurut Sugiyono (2014:183) menyatakan bahwa tingkat hubungan 0,90–1000 memiliki hubungan yang sangat kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebebasan korupsi, kebebasan investasi, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan pengeluaran pemerintah dan kebebasan hak

kepemilikan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,931 yang menandakan bahwa sebesar 93,1% pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dijelaskan oleh variabel-variabel independen; kebebasan korupsi, kebebasan investasi, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan pengeluaran pemerintah dan kebebasan hak kepemilikan memiliki, sedangkan sisanya sebesar 6,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak teramati dalam penelitian ini.

Pembuktian Hipotesis

a. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat dibuktikan bahwa hipotesis alternatif (H_a) dalam penelitian ini dapat diterima. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas kebebasan korupsi (X1), kebebasan investasi (X2), kebebasan moneter (X3), kebebasan perdagangan (X4), kebebasan pengeluaran pemerintah (X5) dan kebebasan hak kepemilikan (X6). Variabel-variabel tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu dengan nilai F_{hitung} sebesar 55,997 dan F_{tabel} sebesar 2,31 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel-variabel bebas yang diteliti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

b. Pengujian Secara Parsial

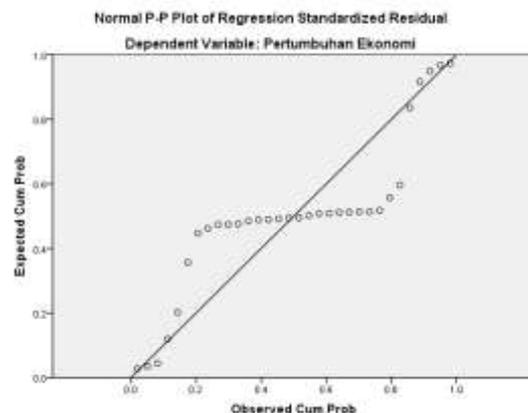
Adapun statistik uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel-variabel independen; kebebasan korupsi, kebebasan investasi, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan pengeluaran pemerintah dan kebebasan hak kepemilikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -3,364 untuk variabel kebebasan korupsi (X1), sebesar -6,611 untuk variabel kebebasan investasi (X2), sebesar -3,416 untuk variabel kebebasan moneter (X3), sebesar 3,313 untuk variabel kebebasan perdagangan (X4), sebesar 3,805 untuk variabel kebebasan pengeluaran pemerintah (X5) dan sebesar 2,055 untuk variabel kebebasan hak kepemilikan (X6). Adapun nilai t_{tabel} untuk ukuran sampel 32 data pada tingkat signifikansi (α) = 5% adalah 2,036. Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan nilai t_{tabel} maka diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial variabel kebebasan korupsi, kebebasan investasi dan kebebasan moneter berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pengujian Asumsi Klasik

a. Pengujian Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi yang relative sederhana yang hanya melibatkan dua parameter. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot, seperti di bawah ini:

Gambar 1. Grafik Uji Normalitas



Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Pengujian Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013:105-106) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF dan tolerance masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas. Hasil pengujian gejala multikolinieritas selengkapnya tersaji pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
KK	0,662	1,708	Tidak terjadi multikolinieritas
KI	0,632	1,728	Tidak terjadi multikolinieritas
KM	0,612	1,530	Tidak terjadi multikolinieritas
KP	0,672	1,763	Tidak terjadi multikolinieritas
KPP	0,622	1,029	Tidak terjadi

			multikolinieritas
KHP	0,613	1,818	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Sekunder, 2019 (diolah).

Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa pada seluruh variabel independen nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yang terdiri dari kebebasan korupsi, kebebasan investasi, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan pengeluaran pemerintah dan kebebasan hak kepemilikan telah bebas dari persoalan multikolinieritas.

c. Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi di dalam model regresi linear, harus dilakukan apabila data merupakan data time series atau runtut waktu. Gejala autokorelasi dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Menurut Santoso (2011:241) untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW). Hasil pengujian autokorelasi selengkapnya tersaji pada tabel 4.4:

Tabel 4. Nilai Durbin-Watson

Model	Durbin – Watson
1	0,475

Sumber: Data Sekunder, 2019 (diolah)

Berdasarkan tabel 4 diatas, untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji DW, dengan nilai DW sebesar 0,475. Untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji DW, dengan cara melihat besaran DW yaitu sebagai berikut :

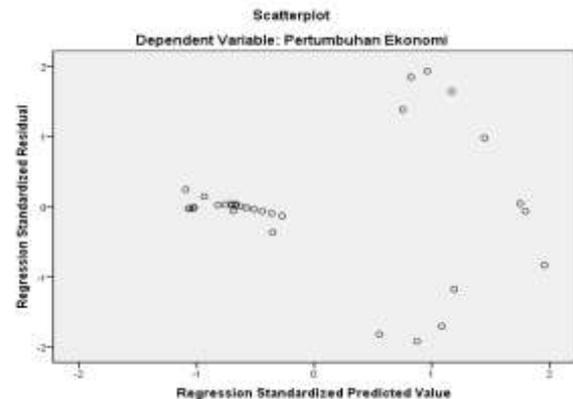
1. Angka D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D-W diatas +2, berarti autokorelasi negatif.

Hasil uji autokorelasi diatas, menunjukkan bahwa nilai statistik DW sebesar 0,475. Oleh karena itu, angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

d. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Seperti terlihat dalam gambar 4.2 berikut:

Gambar 2. Grafik Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat bahwa sebaran residual tidak teratur, ditandai dengan plot yang terpecah di atas dan di bawah nol pada sumbu y dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas yang mengkhawatirkan terhadap variabel metrik yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan

1. Kebebasan korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Kebebasan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Kebebasan moneter berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Kebebasan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
5. Kebebasan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
6. Kebebasan hak kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

6. Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln. 2014. *Ekonomi Pembangunan*, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Boediono. 2014. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Makro*. BPFE: Yogyakarta.
- BPS Indonesia. 2018. *Buku Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta.

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Heritage Foundation. 2018. *Index of Economic Freedom in Indonesia: Methodology*. Diakses dari <http://www.heritage.org/index/book/methodology> pada 20 April 2019.
- Santoso, Singgih. 2011. *Statistik Parametrik*. Cetakan Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2014. *Ekonomi Pembangunan: Proses, masalah, dan dasar Kebijakan* (edisi ke kedua). Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- Suparyati, Agustina. 2014. Dampak *Economic Freedom* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Media Ekonomi*. Vol. 22.No. 3.
- Todaro, M.P. 2015. *Pembangunan Ekonomi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Wulandari. 2014. Dampak *Economic Freedom* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *JESP*. Vol. 6.No. 2.

